

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
SECARA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT**

Madha Sekar Azizah

NPP. 30.0554

*Asdaf Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat*

*Jurusan Kebijakan Publik Fakultas Politik Pemerintahan*

Email: sekarazizah87@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dra. Pratiwi Nurhascaryani, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The government creates service facilities to meet community needs. One of the services provided is to provide convenience in obtaining permits. The government issued Government Regulation Number 24 of 2018 which regulates Electronically Integrated Business Licensing Services. The regulation explains that in order to obtain a business license, it is required to use the Online Single Submission (OSS) system. Online Single Submission (OSS) is used to take care of business licensing from the start to the issuance of permits. Purpose:* *This study aims to describe or find out the implementation of an electronically integrated business licensing system (online single submission) in improving the quality of public services One-Stop Investment and Services Agency. The research was located at the Investment and One Stop Service Office of Sumedang Regency as the research location. This study uses a qualitative approach to process the data obtained from the research location where the data is in the form of words, sentences, schemes or pictures. Method:* *This research is a descriptive research, namely to find out or describe the reality of the events studied or research conducted on independent or single variables, without making comparisons or connecting with other variables. Result:* *The findings that I obtained are that many people still do not have business licenses and the DPMPTSP of Sumedang Regency already has various kinds of applications that can make it easier for people to make permits. Conclusion:* *The results of this study concluded that the implementation of the Electronically Integrated Business Licensing Services at the Department of Investment and the One Stop Service (DPMPTSP) has been running according to the procedures and the achievements obtained are in accordance with the objectives of the service. However, this is considered not optimal in its implementation where*

*there are several inhibiting factors such as the lack of public knowledge regarding the online single submission (OSS) system.*

**Keywords:** *Implementation, Permission, Online Single Submission (OSS)*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pemerintah menciptakan kemudahan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu pelayanan yang diberikan adalah memberikan kemudahan untuk mengurus perizinan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang didalamnya mengatur terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan tersebut menjelaskan bahwasanya untuk mengurus izin usaha diwajibkan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Online Single Submission (OSS) digunakan untuk mengurus perizinan usaha dari awal hingga diterbitkannya izin. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau mengetahui implementasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian berlokasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sebagai lokasi penelitian. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dimana data berupa kata, kalimat, skema atau gambar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. **Hasil Temuan:** Hasil temuan yang saya peroleh masyarakat yang masih banyak belum mempunyai surat izin berusaha dan DPMPTSP Kabupaten Sumedang sudah memiliki berbagai macam aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk membuat perizinan. **Kesimpulan :** Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah berjalan sesuai prosedur dan pencapaian yang diperoleh sudah sesuai dengan tujuan dinas. Namun hal tersebut dinilai belum maksimal dalam pelaksanaannya dimana terdapat beberapa faktor penghambat seperti minimnya pengetahuan terkait sistem *Online Single Submission (OSS)*.

Kata Kunci : Implementasi, perizinan, *Online Single Submission (OSS)*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perizinan merupakan salah satu pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan merupakan salah satu jenis pelayanan publik dalam bidang administratif. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Terdapat banyak jenis perizinan di Indonesia, sesuai dengan beragamnya usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah perizinan berusaha. Untuk membuat perizinan berusaha maka pemilik usaha harus menjalani proses birokrasi yang panjang dan berbelit dikarenakan pelayanan yang masih berbasis manual serta banyaknya berkas yang harus disiapkan dan persyaratan yang harus dipenuhi, pelaku usaha juga harus mengeluarkan biaya selama proses pengajuan perizinan untuk menyiapkan berkas dan juga ongkos transportasi. Pelayanan yang masih berbasis manual juga rentan akan tindak pungutan liar diluar prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dinilai tidak efektif dan efisien. Maka dari itu pemerintah merancang dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

*Online Single Submission (OSS)* merupakan bentuk inovasi pelayanan publik dibidang perizinan dengan mengadopsi teknologi informasi di bidang pelayanan perizinan. Pelayanan *OSS* tersebut bertujuan agar mekanisme perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat dilakukan secara efektif, efisien dan untuk menghindari terjadinya praktek korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu perangkat pemerintah yang menerapkan sistem pelayanan satu pintu sebagai instansi dinas yang khusus bertugas memberikan pelayanan Perizinan secara elektronik menggunakan *Online Single Submission (OSS)* dalam pelaksanaannya dan dapat di akses langsung melalui online, namun tanggungjawab serta peran DPMPTSP Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tetap berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peraturan yang ada dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan perbaikan-perbaikan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, salah satunya ialah perbaikan dalam sektor pelayanan publik khususnya di pelayanan perizinan dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang yang berperan aktif dalam penataan ruang dan mampu mencapai hasil maksimal sesuai

dengan tujuan dan sasaran kerja yang ditetapkan dimana DPMPTSP Kabupaten Sumedang membantu Bupati Sumedang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan dinas atau instansi tersebut. Namun dari segi peraturan atau pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Sumedang masih banyak ditemukan kasus-kasus seperti pelanggaran tidak membuat surat izin usaha.

## **1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perizinan berusaha secara online single submission di DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Sumedang Bertanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan perizinan berusaha secara OSS agar pelaku usaha mempunyai nomor izin berusaha (NIB). Namun pelaku usaha masih ditemukan ada yang tidak memiliki surat izin usaha dan banyak masyarakat khususnya pelaku usaha tidak paham mengenai aplikasi OSS dalam membuat perizinan.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

1. Irfan Syarif (2020) Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Kota Samarinda, Metode Deskriptif Kualitatif, hasil yaitu DPMPTSP pelayanan perizinan Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum optimal.
2. Prisca Mbura (2021) Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Kabupaten Timor Tengah Utara , Metode Deskriptif Kualitatif . Hasil penelitian ini yaitu secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik tetapi masih kurangnya sosialisasi dan masyarakat masih ada yang membuat surat izin usaha dengan manual karena rendahnya SDM.
3. Anis Nur Fadhilah (2019) Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Kabupaten Nganjuk, Metode Deskriptif Kualitatif. Hasil yaitu pelayanan perizinan sudah jelas, mampu dipahami dan cukup baik.

## **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai implementasi kebijakan perizinan Berusaha secara OSS yang ada di DPMPTSP Kabupaten Sumedang dan lokasi yang berbeda dengan penelitian terdahulu dan menggunakan teori Edward III.

## 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau mengetahui implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha dan apa saja faktor pendukung dan penghambat serta hambatan-hambatan apa saja dalam pelayanan perizinan berusaha secara online single submission (oss) dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu mendalami isi analisis dengan menguraikan bentuk deskriptif menggunakan kata-kata yang fakta sesuai dengan kenyataan yang didapatkan di lapangan. Penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2017:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Secara *Online Single Submission (OSS)* Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang

Dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Secara *Online Single Submission (OSS)* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa barat penulis menggunakan indikator menurut Edward III. dan memiliki empat faktor penting yang dapat mempengaruhi suatu proses kebijakan. Faktor tersebut adalah (a) Komunikasi; (b) Sumber Daya; (c) Sikap Implementor (dispositions) atau kecenderungan dan (d) Struktur Birokrasi. Berdasarkan teori tersebut serta data-data yang terkumpul selama proses penelitian, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan perizinan berusaha secara *online single submission (oss)* merupakan penyampaian informasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Provinsi

Jawa Barat selaku pelaksana teknis yang akan berkoordinasi dengan semua instansi yang terkait untuk mempercepat dalam perizinan berusaha.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada saat melaksanakan penelitian terkait dengan komunikasi implementasi kebijakan perizinan berusaha secara OSS di Kabupaten Sumedang ada 3 (tiga) hal penting yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak optimal dalam teori komunikasi Edward III. 3 (tiga) hal penting dalam komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

a. Transmisi

Faktor pertama yang mempengaruhi komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat mengimplementasikan suatu keputusan, dia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan surat perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Proses penyampaian atau transmisi terkait dengan Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha di Kabupaten Sumedang yang dimana selaku pelaksana teknis ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang salah satunya dengan melakukan sosialisasi

b. Konsistensi

Konsistensi kebijakan perizinan berusaha secara OSS ini dapat mendukung keberhasilan suatu kebijakan. Dimana dalam menjalankan program perlu adanya konsistensi koordinasi agar capaian dalam perizinan berusaha secara OSS bisa lebih ditingkatkan.

c. kejelasan

Kejelasan dalam komunikasi kebijakan menurut Edward III ialah hal penting. Apabila kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuknya tidak hanya harus diterima oleh para implementor, tetapi juga komunikasi kebijakannya harus jelas. Di Kabupaten Sumedang pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara OSS sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, masyarakat sudah sangat terbantu dengan adanya pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara OSS. Pelayanan perizinan berusaha secara OSS ini sudah sangat jelas dan sangat membantu dalam pelayanan kepada masyarakat

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu indikator penting penunjang implementasi suatu kebijakan. Menurut Winarmo (2014;184) sumber-sumber yang penting menurut Edward III yaitu sumber daya manusia atau staf yang memadai serta sumber daya finansial yang cukup.

#### a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan implementor dari sebuah kebijakan, sehingga berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh staff ataupun pegawainya. Dalam pelayanan perizinan berusaha secara OSS di Kabupaten Sumedang ini untuk sumber daya manusianya tidak memiliki kekurangan dan Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan perizinan secara OSS di Kabupaten Sumedang. Dengan sumber daya manusia yang tersedia DPMPTSP Kabupaten Sumedang mampu mengimplementasikan perizinan berusaha secara OSS dengan baik dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pemohon. Walaupun pelaksana memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda tetapi mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang menerbitkan izin usahanya.

#### b. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial merupakan sumber daya yang melibatkan persoalan tentang dana atau modal awal yang memang sudah direncanakan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu yang nantinya akan dialokasikan dalam suatu kegiatan

#### 3. Disposisi / Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana tentunya juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Karena apabila sikap implementor baik terhadap suatu kebijakan, hal tersebut berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka akan melakukan kebijakan sesuai dengan keinginan para pembuat kebijakan.

Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam disposisi, yaitu:

- a. Pengangkatan birokrat haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas, dan loyalitas terhadap kebijakan yang dijalankan.
- b. Insentif, oleh karena umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka diperlukan manipulasi insentif agar orang dapat bertindak sesuai harapan pembuat kebijakan. DPMPTSP Kabupaten Sumedang untuk menambah motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya pemberian insentif atau penghargaan kepada pegawai menjadi salah satu cara yang bisa digunakan dalam mengapresiasi pegawai seperti memberi pujian, memberi apresiasi dan secara rutin dengan seluruh pegawai mengadakan *family gathering* yang rutin dilaksanakannya setiap akhir tahun guna mempererat tali silaturahmi antar pegawai

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang bertugas memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi suatu kebijakan karena perumusan dan penetapan kebijakan dibutuhkan adanya suatu sistem untuk pengimplementasiannya. Menurut Edward III, ada dua karakteristik yaitu Standart Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi.

a. Standart Operational Procedure (SOP).

Prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standart Operational Procedure (SOP) yang berasal dari dalam (internal) organisasi berisi standar-standar baku dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang cocok untuk organisasi yang relative tidak menghadapi perubahan drastis. Namun, akan sulit untuk menyesuaikan diri terhadap organisasi yang menghendaki perubahan secara lazim dilakukan. Dengan kata lain, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Di Kabupaten Sumedang saat ini pelayanan perizinan berusaha yang diberikan semakin membaik, yang dulunya masyarakat kurang paham akan SOP yang ada, namun sekarang petugas pelayanannya bersedia menjelaskan yang kurang dimengerti dari masyarakat, agar tidak ada lagi kesalahan

b. Fragmentasi

Fragmentasi sangat penting dalam pelaksanaan implementasi. Dalam buku Budi Winarmo (Budi Winarmo, 2012:210) juga menjelaskan bahwa fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Kabupaten Sumedang tidak memerlukan koordinasi instansi lain dalam memproses perizinan berusaha secara OSS, hal ini pengimplementasian kebijakan perizinan secara OSS pada DPMPTSP Kabupaten Sumedang tidak terjadi Fragmentasi kepada instansi lainnya

### **3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha secara *Online Single Submission (OSS)* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang**

a. **Faktor Pendukung**

1. Sistem Aplikasi Terintegrasi

Sisitem ini diciptakan oleh Pemerintah Pusat untuk diterapkan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat urutan dan syarat-syarat untuk menjalankan pelayanan perizinan berusaha. Sistem juga sudah di desain agar mudah digunakan, cepat, transparan dan tidak berbelit-belit.

## 2. sarana dan Prasarana yang memadai

Untuk menerapkan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik DPMPTSP telah menyediakan sarana dan Prasarana yang memadai. sarana dan prasarana di DPMPTSP Kabupaten Sumedang terdapat ruang pelayanan ber AC, komputer akses untuk petugas dan untuk pemohon, ruang pengaduan/konseling, mushola, toilet, free wifi, mobil pelayanan keliling, parkir luas teratur. Sarana dan prasarana di DPMPTSP ini agar semua petugas operator dapat menggunakan semua alat bantu dan perlengkapan pelayanan perizinan berusaha.

## 3. Sumber Daya Manusia

Petugas pelayanan perizinan memiliki kemampuan yang baik dalam melayani pemohon untuk membimbing ke akses aplikasi OSS, sehingga sangat memudahkan para pemohon perizinan. petugas pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Sumedang petugas pelayanan sudah memiliki kemampuan dalam melayani pemohon dan petugas pelayanan perizinan dan sudah mengerti berkaitan dengan OSS agar saat melayani masyarakat dapat membantu dengan cepat

### **b. Faktor Penghambat**

1. Sulitnya Akses Masuk Website *Online Single Submission (OSS)* Sistem *Online Single Submission (OSS)* digunakan secara Nasional di setiap kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah Indonesia sehingga banyaknya jumlah pengunjung pada website OSS dalam waktu yang bersamaan mengakibatkan sulitnya akses masuk pada website OSS. Jika aplikasi banyak dipakai biasanya Tidak dapat masuk ke aplikasi OSS di halaman Log-In, dan terjadi error sistem saat proses penerbitan NIB sehingga akan kembali ke halaman awal, hal seperti ini sering sekali terjadi akibatnya akan membuat hilang poin-poin KBLI yang telah di cantumkan dalam sistem OSS.

## 2. Komunikasi

Berkaitan dengan sosialisasi yang belum tersampaikan secara menyeluruh sehingga belum tersampainya informasi terkait dengan *Online Single Submission (OSS)* kepada masyarakat serta pihak-pihak yang terkait. Kurangnya publikasi terkait dengan sistem aplikasi yang telah dibuat juga menyebabkan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan sistem dan alur kerja dari *Online Single Submission (OSS)* itu sendiri.

3. Tidak semua perizinan terdaftar pada aplikasi *Online Single Submission (OSS)*. sebagaimana aplikasi yang masih terbilang baru, masih banyak yang perlu dikembangkan lagi. Salah satunya yaitu tidak semua perizinan dapat diproses dan di akses pada aplikasi. *Online Single Submission (OSS)* contoh aplikasi yang tidak

terdaftar pada *Online Single Submission (OSS)* adalah IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan Izin Sektor Pendidikan karena mempunyai aplikasi tersendiri

### **3.3 Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha secara Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang**

#### **1. Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat**

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai informasi dan alur-alur yang ada pada aplikasi *OSS* agar masyarakat lebih paham dalam informasi yang ada di website. Tingkat pemahaman masyarakat yang dianggap masih rendah dalam memahami berbagai alur, prosedur dan persyaratan dalam mengurus izin berusaha. Untuk itu dilakukan sosialisasi agar masyarakat lebih paham dengan informasi mengenai pembuatan NIB secara *Online Single Submission (OSS)* yang ada di website *OSS*.

#### **2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat**

Dalam mengatasi hambatan yang ada terkait pelayanan perizinan berusaha DPMPTSP Kabupaten Sumedang melakukan upaya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang masih belum paham dengan pelayanan perizinan berusaha. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang siap untuk membantu dan memandu secara langsung dan cepat kepada pelaku usaha dalam menggunakan sistem *OSS*.

#### **3. Melakukan pengawasan dan evaluasi**

Setiap pelaksanaan pelayanan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perizinan berusaha ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya melakukan pengawasan dan evaluasi setiap pelaksanaan kepada masyarakat serta rutin melaksanakan pertemuan guna menciptakan ide yang mampu memberikan inovasi yang dapat diterapkan terhadap pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Sumedang.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha secara online single submission di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sumedang memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Penulis menemukan temuan penting yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu membuat inovasi dan membuat pelayanan dengan cepat, nyaman, transparan dan memudahkan masyarakat pelaku usaha dalam membuat nomor izin berusaha melalui aplikasi Online Single Submission (*OSS*).

DPMPTSP Kabupaten Sumedang sering melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengenal dan mengetahui aplikasi OSS agar dapat memudahkan masyarakat dalam membuat perizinan.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam sosialisasi mengenai perizinan yaitu tingkat kesadaran yang masih rendah dan kurangnya partisipasi masyarakat khususnya pelaku usaha.

## **IV. KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang dalam pelayanan perizinan berusaha sudah cukup baik. Hanya saja masih terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Sumedang, terutama terkait aplikasi OSS sendiri yang masih belum optimal dalam penggunaannya dan masih memiliki banyak kekurangan sehingga sangat perlunya perbaikan dan pengembangan sistem kedepannya. Serta terkait sosialisasi kepada masyarakat akan penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) yang belum sepenuhnya masyarakat memahami sistem/cara kerjanya.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan pelayanan perizinan secara OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan terima kasih terutama kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian & Pengembangan, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Fadhilah, Anis. (2019). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (Oss) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 7, No. 4

Mbura, Prisca. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 3, No. 2

Syarif, Irfan. (2020). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 8 No.3



